

INTISARI

Latar Belakang: Data kecelakaan kerja di Indonesia mengalami peningkatan pada periode tahun 2019-2021. Dalam data penyakit akibat kerja pegawai perkantoran nonswasta berdasarkan RISKESDAS 2018 tercatat proporsi cedera 56,7% dan prevalensi hipertensi 36,91%. Kondisi ini perlu diperhatikan agar KK dan PAK di Indonesia lebih rendah. Kantor Grha BPJamsostek yang telah berdiri lebih dari 10 tahun dengan 12 lantai memiliki struktur organisasi K3 yang belum terbentuk secara mandiri serta adanya kejadian tergelincir hingga terkilir, HNP, *low back pain*, iritasi mata dan mata lelah menarik peneliti untuk melakukan penelitian mengenai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di kantor Grha BPJamsostek.

Tujuan: Untuk mengetahui penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di Kantor Grha BPJamsostek.

Metode: Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan jumlah informan dalam sebanyak 12 orang. Instrumen penelitian ini adalah pedoman wawancara, *checklist* studi dokumen serta lembar observasi.

Hasil: Kebijakan K3 BPJS Ketenagakerjaan Grha BPJamsostek Jakarta memiliki tujuan dan sasaran yang jelas dan ditanda tangani oleh direktur utama. Rencana K3 mengacu pada aturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan hasil identifikasi bahaya. Pelaksanaan K3 dilakukan oleh SDM yang kompeten, namun belum terdapat unit khusus K3 yang terbentuk secara mandiri. Tersedia anggaran K3 yang memadai sehingga memiliki berbagai kegiatan K3 serta sarana dan prasarana yang baik. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan pengecekan sarana prasarana serta melaksanakan audit internal K3. Tinjauan ulang dan peningkatan kinerja K3 tidak terdapat dokumen terkait dengan hal tersebut, tetapi perusahaan melakukan renovasi gedung sehingga pegawai merasa aman dan nyaman.

Kesimpulan: SMK3 telah dijalankan tetapi belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Sebaiknya perusahaan membentuk unit K3 secara mandiri agar SMK3 dapat berjalan dengan baik, berkelanjutan, dan konsisten.

Kata Kunci: SMK3, K3, K3 Perkantoran

ABSTRACT

Background: Work accident data in Indonesia has increased in 2019-2021. Data on occupational diseases for non-private office employees based on RISKESDAS 2018 recorded that an injury proportion is 56.7% and a prevalence of hypertension is 36.91%. This condition needs to be considered so that work accidents and work diseases in Indonesia can be lower. The building of BPJS Ketenagakerjaan Grha BPJamsostek office has been established for more than ten years with 12 floors, the Occupational Safety and Health (OSH) organizational structure has not been formed independently and there are incidents of slipping and sprains, HNP, low back pain, eye irritation, and tired eyes.

Objective: This study aims to determine the implementation of the occupational safety and health management system in BPJS Ketenagakerjaan Grha BPJamsostek Office in Jakarta.

Methods: Qualitative research used case study approach with a total of 12 informants. This research instrument were an interview guide, document study checklist, and observation sheet.

Results: The OSH policy had clear goals and objectives and was signed by the main director. OSH planning refers to applicable laws and regulations based on the results of hazard identification. Competent human resources implement occupational health and safety (OHS), but a dedicated OHS unit has not yet been independently established. Adequate OHS funding is available, the company has various OHS activities and provides good facilities and infrastructure. Monitoring and evaluation were carried out by checking infrastructure and internal OSH audits. For reviewing and improving OSH performance, there were no documents related to this, but the company had renovated the building and all employees felt safe and comfortable.

Conclusion: OSHMS had been implemented but was not fully running well, the company should form an independent OSH unit so the OSHMS can be running as well, sustainably, and consistently.

Keywords: OSHMS, OSH, OSH Office